

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan visi misi RPJMD yang dijabarkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan setiap tahun, didasarkan pada analisis hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional serta rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam rencana jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan prioritas.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2013 yang dikaitkan visi misi adalah sebagai berikut:

Tabel.T-IV.1
Hubungan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik	1. Menciptakan aparatur pemerintah yang profesional	1. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis
			2. Tercapainya SPM daerah
			3. Terselenggaranya Pelayanan Prima
2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan	1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)
			1. Terwujudnya perilaku hidup sehat
			2. Terciptanya lingkungan sehat
3.	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan
			2. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan
			1. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan
4.	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	1. Mempermudah akses pendidikan	2. Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau
			1. Meningkatnya pelayanan kesehatan
			2. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan
4.	Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan	1. Meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah	1. Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah
			2. Ketersediaan pangan daerah
			3. Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing
			4. Pemasaran komoditas daerah

5.	Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	1. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian
			2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar
6.	Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama	1. Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, berbudi luhur dan damai	1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai
			2. Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat

Tujuan Pembangunan daerah yang tertuang dalam tabel hubungan Visi, Misi dan Tujuan, sasaran Pembangunan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menciptakan aparatur pemerintah yang profesional

Aparatur pemerintah yang profesional adalah aparatur yang memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai dalam mencapai tujuan tersebut adalah:

- Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis
- Tercapainya SPM daerah
- Terselenggaranya pelayanan prima

2. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan

Dikandung maksud bahwa, pemerintah daerah pada prioritas pembangunan tahun 2013 ini berupaya untuk melaksanakan fungsinya sebagai pelayan (*publik servant*) kepada masyarakat secara cepat, efisien, transparan dan bertanggungjawab. Dalam eksistensinya, sistem pemerintahan akan berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan serta perubahan dan perkembangan yang ada dalam faktor lingkungan.

Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan, dicapai dengan sasaran:

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Akses masyarakat terhadap prasarana atau infrastruktur kesehatan juga sangat menentukan dalam pembentukan kualitas sumberdaya manusia. Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan, termasuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengingat bahwa setiap warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan

dengan baik. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik akan memenuhi harapan, keinginan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat dalam rangka pelayanan kesehatan.

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2013 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah:

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan.

4. Mempermudah akses pendidikan

Tingkat pendidikan dan infrastruktur pendidikan yang tersedia di suatu daerah akan menentukan kualitas SDM di daerah tersebut. Akses pendidikan daerah memainkan peranan sangat penting dan strategis dalam pembangunan, guna mencapai masyarakat yang maju, mandiri dan beradab. Oleh karena itu, pada tahun 2013 pemerintah daerah telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan jangka menengah daerah, dengan sasaran:

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan

5. Meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat. Dalam upaya tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mengetahui potensi wilayah yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2013 dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah adalah:

Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar

Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya secara lebih baik, sehingga bisa mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur termasuk pendidikan dan kesehatan dasar yang lebih baik, proses pengurangan kemiskinan yang merupakan pilar utama kebijakan pemerintah daerah saat ini, juga dapat lebih dipercepat. Sebagaimana diketahui, pengertian kemiskinan tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi pangan saja, tetapi juga terkait dengan tidak terpenuhinya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap fasilitas umum lainnya.

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2013 dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar adalah:

Meningkatnya infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2013

Prioritas Pembangunan Tahun 2013 merupakan rencana tahunan yang memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan yang berisi indikator-indikator kinerja beserta target dari setiap program dan kegiatan sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat diukur walaupun masih bersifat indikatif. Tahun 2013 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan 2011-2016 sebagai upaya pencapaian visi misi Kepala Daerah. Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2013, maka tema pembangunan yang menjadi fokus pada tahun 2013 adalah "PEMANTAPAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DIDUKUNG INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT". Dalam mewujudkan tema pembangunan tersebut, maka prioritas pembangunan tahun 2013 untuk:

1. Peningkatkan pelayanan prima;
2. Peningkatan sarana prasarana, mutu pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan infrastruktur dasar;
4. Peningkatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi produksi pertanian dan perikanan;
5. Pembangunan ekonomi unggulan melalui pengembangan UMKM dan investasi daerah;
6. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Prioritas pembangunan tahun 2013 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMD tahun 2011-2016, sebagai berikut :

Tabel.T-IV.2
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 4. Program Penetapan dan Pengendalian Penerapan SPM 5. Program Penetapan dan Pengendalian Penerapan SOP 6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 9. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 10. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 11. Program perencanaan pembangunan daerah 	1. Peningkatkan Pelayanan Prima
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pendidikan anak usia dini 2. Program Pendidikan Menengah 3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Pendidikan Luar Biasa 6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9. Program Lingkungan Sehat Perumahan 10. Program pengembangan lingkungan sehat 11. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 	2. Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan serta kesehatan
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembangunan jalan dan jembatan 2. Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan 4. Program pembangunan infrastruktur pedesaan 5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 6. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 7. Pemberdayaan komunitas perumahan 8. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 9. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 	3. Peningkatkan infrastruktur dasar
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2. Program peningkatan produksi hasil peternakan 3. Program pengembangan budidaya perikanan 4. Program pengembangan perikanan tangkap 5. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 	4. Peningkatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi produksi pertanian dan perikanan

	6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
5.	1. Program perencanaan pembangunan ekonomi 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	5. Pembangunan ekonomi unggulan melalui pengembangan UMKM dan investasi daerah
6.	1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program pengembangan wawasan kebangsaan 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	6. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan

Adapun indikator dan target masing-masing prioritas program pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.T-IV.3
Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Program / Pembangunan	Kinerja			SKPD
			Indikator		Target	
1.	Peningkatkan Pelayanan Prima	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Setda, Setwan, Satpol PP, BKD, Diklat, KPP, RSUD
		2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1	% Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	91,08	BKD
		3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD	8	Setwan
			2	% Hasil dialog dengan tokoh masyarakat, pimpinan organisasi dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	67,18	
			3	Ketepatan agenda sidang / rapat		
				- Rapat Paripurna	16	
				- Rapat Gabungan Komisi	10	
				- Rapat Komisi	80	
				- Rapat Badan Musyawarah	8	
				- Rapat Badan Anggaran	24	
				- Rapat Badan kehormatan	6	
				- Rapat Badan Legislasi	8	
				- Rapat Pimpinan	9	
				- Rapat Pansus	36	
			4	% Voting yang diadakan DPRD dalam sidang Paripurna selama 1 tahun	6,25	

		4. Program Penerapan dan pengendalian SPM	1	% SPM yang diterapkan	13	
		5. Program Penerapan dan pengendalian SOP	1	% SKPD yang mencapai target SPM	100	
		6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	% peningkatan pajak daerah	110	DPPKA
			2	% peningkatan retribusi daerah	110	
			3	% peningkatan lain-lain PAD yang sah	110	
			4	% PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD	5	
			5	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan	Maret	
			6	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	
			7	Ketepatan waktu penetapan APBD	Desember	
			8	% belanja langsung terhadap DAU	40,70	
			9	% belanja langsung terhadap belanja daerah	25,95	
			10	% dana perimbangan yang terserap	110	
			11	% SILPA terhadap total pendapatan	7,71	
			12	% ketersediaan sistem informasi keuangan daerah	90	
		7. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	% pemenuhan pelaksanaan pemeriksaan berkala atas kinerja SKPD	100	Setda & Inspektorat
			2	% rekomendasi temuan pemeriksaan yang ditindak lanjuti	100	
			3	Ketepatan waktu penyelesaian LKPJ	90Hari	
			4	Ketepatan waktu penyelesaian LPPD dan ILPPD	90Hari	
			5	Jumlah SKPD menerapkan SOP	31	
			6	Urusan kesejahteraan rakyat yang ditangani	5	
			7	Jumlah SKPD, BUMD yang melaksanakan IKM	30	
			8	Urusan sumber Daya Alam yang ditangani	5	
			9	Urusan Perekonomian yang ditangani	6	
			10	Pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	310	
		8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Setda, DPPKA, Cipta Karya dan KPP

		9. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1	% tenaga pemeriksa yg mendapat pendidikan dan latihan tehnik pengawasan	30	Inspektorat
		10. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1	Pedoman sistem dan prosedur pengawasan yg disusun	1	Inspektorat
		11. Program perencanaan pembangunan daerah	1	% konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100	Bappeda dan PM
			2	Ketepatan waktu penetapan RKPD (hari)	115	
2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Program pendidikan anak usia dini	1	APK PAUD	45,50	Dinas Pendidikan
			2	APK TK	45,10	
		2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1	APK SD/MI Paket A	103,1	Dinas Pendidikan
			2	APK SMP/MTs/Paket B	97,50	
			3	APM SD/MI	98,93	
			4	APM SMP/MTs	83,29	
		3. Program Pendidikan Menengah	1	APK SMA/SMK/MA/Paket C	68,9	Dinas Pendidikan
			2	APM SMA/SMK/MA/Paket C	56,53	
		4. Program Pendidikan Non Formal	1	Angka Melek Huruf	92,72	Dinas Pendidikan
		5. Program Pendidikan Luar Biasa	1	% Kebutuhan perlengkapan sekolah	58,64	Dinas Pendidikan
		6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	% Guru SD/MI sesuai klasifikasi	72,28	Dinas Pendidikan
			2	% Guru SMP/MTs sesuai klasifikasi	93,73	
			3	% Guru SMA/MA/SMK sesuai klasifikasi	98,32	
			4	% Guru SD/MI yang bersertifikasi pendidik	63,07	
			5	% Guru SMP/MTs yang bersertifikasi pendidik	64,18	
			6	% Guru SMA/MA/SMK yang bersertifikasi pendidik	75,82	
		7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	%Laporan evaluasi dan monitoring tepat waktu	100	Dinas Pendidikan
			2	% Meningkatkan Jumlah kerjasama antar lembaga pendidikan	100	
			3	% Peraturan yang disosialisasikan	100	
			4	% Jumlah komite sekolah yang dibina	100	

			5	% Berfungsinya sistem informasi manajemen pendidikan	100	
		8. Program Lingkungan Sehat Perumahan	1	% luasan lingkungan permukiman kumuh	0,066	Dinas Cipta Karya tata ruang dan kebersihan
		9. Program pengembangan Lingkungan Sehat	1	Tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	66	Dinas Kesehatan
			2	% Institusi yang dibina	68	
			3	% Tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	65	
			4	%Pemeriksaan depo air minum	100	
			5	%Akses jaban sehat dalam program STBM	45	
			6	%desa melaksanakan STBM	50,8	
		10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	% Cakupan rawat jalan	53	Dinas Kesehatan
			2	% Cakupan rawat inap	1,35	
			3	% Kunjungan puskesmas / visit rate	80	
			4	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	23	
			5	Angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup	115	
			6	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	45	
			7	Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh nakes / tenaga terlatih	95	
			8	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	90	
			9	Meningkatnya penduduk yang memanfaatkan Rumah sakit	32,10	RSUD
3	Peningkatkan infrastruktur dasar	1. Program pembangunan jalan dan jembatan	1	% Panjang jalan yang dibangun	41,22	Bina Marga dan Pengairan
			2	% Jembatan yang dibangun	82,97	
		2. Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan	1	% peningkatan kondisi jalan yang baik	55,58	Bina Marga dan Pengairan
			2	% peningkatan kondisi jembatan yang baik	92,45	
		3. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	1	Panjang jalan yang diinspeksi	100	Bina Marga dan Pengairan
			2	Panjang jembatan yang diinspeksi	100	
		4. Program pembangunan infrastruktur pedesaan	1	% peningkatan pembangunan Jalan Desa	16,95	Bina Marga dan Pengairan
			2	% peningkatan pembangunan Jembatan perdesaan	42,70	

		5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1	% rumah tangga pengguna air bersih	66,03	Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
			2	% peningkatan kondisi jaringan irigasi	64,10	Bina Marga dan Pengairan
			3	% jaringan irigasi yang diinspeksi	100	
		6. Pemberdayaan komunitas perumahan	1	% rumah layak huni	88,73	Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
		9. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	1	% panjang jaringan listrik yang dibangun	0,40	Pertambangan dan energi
		10. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1	% jumlah kelompok masyarakat pembangunan desa yg dibina	6,93	Bapemas & Pemdes
			2	% tingkat keswadayaan masyarakat	34,44	
			3	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	17,3	
4.	Peningkatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi produksi pertanian dan perikanan	1. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1	Jumlah produksi hasil pertanian (ton):		Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
				- Padi	159.779	
				- Palawija	688.856	
				- Sayuran	2.902	
				- Buah-buahan	52.711	
				- Biofarmaka	11.842	
			2	Jumlah produktivitas hasil pertanian Ku/Ha :		
				- Padi	48,79	
				- Palawija	105,69	
				- Sayuran	27,69	
				- Buah-buahan	0,30	
				- Biofarmaka	133,06	
			3	Peningkatan produktivitas hasil perkebunan (ton/Ha)		
				Kelapa	1,359	
				Cengkeh	0,130	
				Kopi	0,540	
				Nilam	7,675	
				Lada	0,121	
				Jarak Pagar	0,120	
				Kapas	0,202	
			4	Peningkatan areal perkebunan (Ha)	42,267	
			5	Peningkatan produksi perkebunan (Ton)	37.722,89	
			6	Penurunan serangan OPT (Ha)		
				Kelapa	111,46	
				Cengkeh	43,81	
				Kakao	29,32	
		2. Program	1	Jumlah produksi daging (kg)	3.060.141	Dinas Tanaman Pangan dan

		peningkatan produksi hasil peternakan	2	Jumlah peningkatan produksi telur (kg)	494.000	Pternakan
			3	Jumlah peningkatan kelahiran hasil IB (ekor)	21.500	
			4	% Service per Conception (SC)	1,32	
			5	Jumlah peningkatan populasi ternak :		
				- ternak besar : sapi, sapi perah, kerbau, kuda	90.825	
				- ternak kecil : kambing, domba	144.035	
				- unggas : ayam, itik, angsa, ayam petelur, ayam broiler	961.690	
		3. Program pengembangan budidaya perikanan	1	Peningkatan produksi perikanan budidaya (kolam, Keramba, Minapadi)	62.637	Dinas Tanaman Pangan dan Pternakan
			2	Peningkatan jumlah pembudidaya ikan	11	
		4. Program pengembangan perikanan tangkap	1	Peningkatan produksi perikanan laut	149.326	Kelautan dan perikanan
			2	Penigkatan jumlah nelayan yang bergerak dalam usaha penangkapan	10	
			3	Peningkatan jumlah kapal	10	
			4	Peningkatan produksi perairan umum (sungai, telaga, waduk)	3.395	
		5. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1	% Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran	3	Kelautan dan perikanan
			2	% Peningkatan produk olahan hasil perikanan		
		11. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1	% Peningkatan ketersediaan bahan pangan		Kantor Ketahanan Pangan
				- Beras	102	
				- Jagung	102	
				- Ubi kayu	102	
				- Telur	102	
				- Daging	102	
				- Ikan	120	
			2	% Peningkatan ketersediaan energy dan proteein per kapita	117	
			3	% Penguatan cadangan pangan	290,89	
			4	% Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	75,00	
			5	% Stabilitas harga dan pasokan pangan	92,39	
			6	% Peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)	111,43	
			7	% Peningkatan Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk	100,72	
5.	Pembangunan ekonomi unggulan	1. Program perencanaan	1	Master plan ekonomi daerah	2	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

	melalui pengembangan UMKM dan investasi daerah	pembangunan ekonomi	2	% Master plan ekonomi daerah yg digunakan untuk perencanaan	60	
		2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1	% Peningkatan kesehatan kelembagaan koperasi	111,72	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			2	Peningkatan anggota koperasi	103,27	
			3	Peningkatan jumlah lembaga koperasi	105,30	
			4	% koperasi aktif	87,88	
		3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1	% Jumlah kemitraan UMKM dg Perusahaan bapak angkat	0,05	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1	% peningkatan jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan	101,99	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			2	% Peningkatan industri formal	145	
		5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	% Intensitas penyelenggaraan pameran investasi	4	Bappeda dan PM
		6. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	1	Bertambahnya sentra-sentra industri	115	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			2	% kontribusi sektor industri terhadap PDRB	5,26	
6.	Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan	1. Program Pengembangan Nilai Budaya	1	Persentase Padepokan seni dan budaya yang dibantu	63,91	Dinas Budparpora
			2	Persentase peningkatan even seni dan budaya	272,16	
			3	Rasio grup kesenian dibanding jumlah penduduk	0,32	
		2. Program pengembangan wawasan kebangsaan		% Jumlah penyelenggaraan forum antar kelompok masyarakat	46	Bakesbang Linmas
		3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Jumlah partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial melalui wadah :		Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				- Karang Taruna	12	
				- PSM	12	
				- WKSBM	12	
				- Orsos	10	
			2	Jumlah pekerja sosial/TKSM yg aktif dalam pemberdayaan sosial	12	
		4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1	Jumlah Fakir miskin yang meningkat kemandirian dan kesejahteraan sosial	100	Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

			2	Jumlah PMKS yg diberi bantuan / santunan :		
				- KAT	180	
				- Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	4	
				- Korban bencana alam	1000	
				- Perintis kemerdekaan/ janda	6	
		5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1	% peningkatan advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	34,5	Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
		6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1	Meningkatnya advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja		Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan